

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang tercermin dalam kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan output barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian secara berkelanjutan, sehingga menjadi indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara (Alfatar & Soebagiyo, 2023). Penelitian lain yang menelaah faktor-faktor makro dalam pertumbuhan Indonesia juga menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan inovasi, selain stabilitas fiskal dan efisiensi pasar, turut menjadi determinan penting dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah fenomena yang terjadi otomatis, melainkan hasil interaksi kompleks antara akumulasi modal, kualitas sumber daya manusia, stabilitas makroekonomi, serta efektivitas kebijakan publik termasuk fiskal dan pasar yang kompetitif (Pramono & Siti, 2025).

2.1.2 Teori Keynes

Teori Keynes dikemukakan oleh John Maynard Keynes (2018) melalui karyanya *The General Theory of Employment, Interest and Money* yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan suatu negara sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat (*aggregate demand*). Menurut

Keynes, perekonomian tidak selalu mampu mencapai kondisi keseimbangan penuh secara otomatis sebagaimana yang dijelaskan dalam teori klasik. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi penurunan konsumsi, investasi, atau aktivitas ekonomi, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal untuk mendorong peningkatan permintaan agregat (Ambarita & Siregar, 2025). Kebijakan fiskal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah maupun pengelolaan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Keynes berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh penerimaan pajak dapat meningkatkan aktivitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect) yang terjadi dalam perekonomian (Keynes, 2018; Mankiw, 2013).

Dalam penelitian ini, Teori Keynes digunakan untuk menjelaskan hubungan antara penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), serta cukai terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Apabila penerimaan pajak meningkat dan dikelola secara efektif, pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan pengeluaran produktif yang dapat mendorong permintaan agregat dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan Teori Keynes, peningkatan penerimaan pajak dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

melalui peran pemerintah dalam mengalokasikan dana publik untuk kegiatan yang mendukung peningkatan output nasional, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat (Mujasmara et al., 2023).

2.1.3 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dan menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional (Riyadi et al, 2021). Dalam buku ekonomi modern oleh Cahyantini (2024) PPh berperan sebagai sumber pendapatan fiskal dan alat untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Penelitian empiris terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa tax revenues, termasuk PPh, secara umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena dana yang dihimpun digunakan untuk mendanai proyek-proyek produktif dan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi nasional. Temuan ini diperkuat oleh Da Lopez (2026), bahwa penerimaan pajak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama apabila pengelolaan fiskalnya efisien dan diarahkan kepada investasi publik yang produktif.

PPh juga memiliki sisi yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi bila tarifnya tidak dirancang dengan hati-hati. Beberapa studi lembaga akademik dan penelitian kebijakan pajak mencatat bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi insentif investasi dan konsumsi, khususnya di sektor swasta, sehingga

berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini tercermin dalam analisis Ompusunggu (2026) yang menunjukkan bahwa kebijakan PPh yang memberatkan dapat mengurangi perluasan usaha, memperlambat iklim investasi, dan menekan belanja konsumen yang merupakan komponen utama permintaan agregat.

Selain itu, penelitian kuantitatif lainnya oleh Sari et al (2024) menemukan bahwa meskipun penerimaan dari PPh penting untuk mendukung kapasitas fiskal pemerintah, dalam beberapa kondisi *pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu signifikan secara statistik*. Hal ini menunjukkan bahwa efek PPh terhadap pertumbuhan ekonomi bisa tergantung pada faktor-faktor lain seperti kondisi makroekonomi global, tingkat investasi asing, inflasi, serta struktur pajak secara keseluruhan.

Secara teoritis, kualitas peran PPh ini sesuai dengan perspektif Keynesian dan teori ekonomi neoklasik. Dari sudut pandang Keynesian, penerimaan pajak yang digunakan secara efektif dalam belanja pemerintah untuk pembangunan dan stabilisasi ekonomi dapat menstimulasi permintaan agregat dan memacu pertumbuhan jangka Panjang (Suparmono, 2018). Keberhasilan kebijakan PPh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada desain tarif, efisiensi administrasi, serta kebijakan pendukung lainnya dalam sistem perpajakan.

Dalam kajian buku Purba et al (2024) ekonomi fiskal, Pajak Penghasilan (PPh) memiliki pengaruh yang kompleks terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor-

faktor ini dapat dibagi menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan dan faktor yang berpotensi menghambat pertumbuhan.

1. Penerimaan Fiskal Pemerintah

PPh menjadi sumber utama penerimaan negara yang meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan ekonomi. Semakin besar penerimaan PPh, semakin banyak dana yang dapat digunakan untuk proyek-proyek produktif seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pendidikan. Menurut Hidayah et al (2025) menyatakan bahwa penerimaan pajak, termasuk PPh, secara umum memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendanaan fiskal digunakan untuk kegiatan yang meningkatkan aktivitas ekonomi secara luas.

2. Stimulasi Permintaan Agregat

Belanja pemerintah yang didanai melalui PPh juga dapat menstimulasi permintaan agregat di perekonomian. Peningkatan belanja publik dan konsumsi masyarakat tidak langsung melalui proyek-proyek produktif mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek hingga menengah (Hidayah et al., 2024).

3. Tarif Pajak yang Tinggi

Tarif PPh yang terlalu tinggi dapat menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Beban pajak yang besar mengurangi insentif investasi, terutama di sektor swasta dan usaha kecil menengah (UKM), karena mengurangi keuntungan dan menahan ekspansi usaha. Penelitian empiris

menunjukkan bahwa tingginya tarif PPh dapat berdampak negatif pada iklim investasi dan pertumbuhan sektor swasta (Rhamadhani, 2024).

2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNPPnBM)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan dua instrumen fiskal konsumtif yang memainkan peranan penting dalam struktur penerimaan negara Indonesia. PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang serta jasa, dan karena sifatnya yang luas serta mencakup hampir seluruh kegiatan ekonomi, jenis pajak ini menjadi salah satu *pillar* utama dalam pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan belanja publik lainnya. Menurut Fatimah et al (2025) menunjukkan bahwa kebijakan terkait PPN dapat mendorong penerimaan pajak secara signifikan, sehingga memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Misalnya, studi *qualitative* menyatakan bahwa optimalisasi PPN dan PPnBM diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan, baik melalui mekanisme pengumpulan pajak maupun peran pajak dalam mengatur pola konsumsi masyarakat (Alfitriyeni & Wulandari, 2025).

PPnBM dikenakan khusus pada barang-barang yang tergolong mewah, seperti kendaraan bermotor berkapasitas tinggi, perhiasan, barang elektronik premium, dan berbagai produk konsumsi kelas atas lainnya. Fungsi utama PPnBM tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian konsumsi

barang mewah agar sejalan dengan tujuan kebijakan fiskal dan sosial, yakni pemerataan konsumsi serta pembatasan konsumsi yang tidak produktif (Mawarni et al, 2021). Menurut Alfitriye & Wulandari (2025) menguatkan hal ini dengan menunjukkan bahwa PPN dan PPnBM saling berinteraksi dalam memengaruhi perilaku konsumsi dan daya beli konsumen; dalam banyak kasus, serta data empiris menunjukkan bahwa kedua jenis pajak tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen serta kontribusi terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Perubahan regulasi mengenai *Pajak Pertambahan Nilai* (PPN) di Indonesia menunjukkan dinamika kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan penerimaan negara dan perkembangan ekonomi nasional. Sejak pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN menjadi instrumen pajak konsumsi utama dengan tarif dasar sebesar 10 % yang berlaku secara konsisten hingga hampir empat dekade. Dalam ketentuan awal UU tersebut, tarif PPN dirumuskan sebagai tarif tunggal yaitu 10 % dari *dasar pengenaan pajak* atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, dengan ruang fleksibilitas perubahan tarif melalui peraturan pemerintah antara 5 % hingga 15 % (UU No. 8/1983 jo. Perubahannya).

Perubahan mendasar terhadap struktur tarif ini terjadi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang merupakan omnibus law reformasi pajak dengan tujuan memperkuat basis fiskal Indonesia dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. UU HPP

merevisi ketentuan sebelumnya dengan menetapkan framework tarif baru PPN yang progresif: pertama, meningkatkan tarif PPN dari 10 % menjadi 11 % efektif mulai 1 April 2022, dan kedua, menjadwalkan kenaikan lebih lanjut menjadi 12 % paling lambat 1 Januari 2025 sebagai bagian dari penyesuaian fiskal yang lebih luas. Perubahan tarif ini bukan semata angka semata, melainkan mencerminkan transformasi kebijakan *tax policy* Indonesia yang bertujuan untuk memperluas basis pajak, menutup *revenue gap*, serta menyesuaikan sistem perpajakan nasional dengan prinsip keadilan dan efisiensi di tengah tekanan fiskal global dan domestik. Menurut Taqwallah & Nugraha (2026) kebijakan kenaikan tarif PPN ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 UU HPP untuk memberi fleksibilitas fiskal lebih luas dengan kisaran tarif antara 5 % hingga 15 %, sehingga pemerintah memiliki ruang kebijakan dalam menanggapi dinamika ekonomi nasional dan global tanpa meninggalkan prinsip tarif tunggal yang berlaku universal untuk semua barang dan jasa kena pajak. Penyesuaian tarif dari 10 % menjadi 11 % dan selanjutnya menjadi 12 % merupakan respons terhadap kebutuhan peningkatan penerimaan dalam menghadapi tantangan seperti penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19 serta defisit anggaran. Meski demikian, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sehingga menjadi topik penting dalam kajian kebijakan fiskal dan ekonomi makro di Indonesia kontemporer.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki peran penting dalam kebijakan fiskal Indonesia baik sebagai

sumber utama penerimaan negara (*budgetair function*) maupun sebagai alat pengatur (*regulerend function*) perilaku konsumsi. Studi empiris menunjukkan bahwa PPN merupakan instrumen utama dalam memperkuat basis penerimaan pajak di Indonesia, terutama setelah pemerintah melakukan penyesuaian tarif secara bertahap dari 10 % ke 11 % tahun 2022 dan rencana 12 % pada 2025. Penelitian Budiman (2025) menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga dan variabel harga secara signifikan memengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM, yang berarti pajak konsumsi tersebut langsung berkaitan dengan volume aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat aspek yang menjadi kontributor besar terhadap pendapatan pajak negara (*tax revenue*) dalam APBN Indonesia.

Sebagai instrumen *regulerend*, PPnBM dirancang untuk mengenakan beban pajak lebih tinggi pada barang-barang mewah sehingga dapat mengatur pola konsumsi kelas atas dan mengendalikan permintaan atas barang yang kurang prioritas dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya, studi yang menganalisis kebijakan PPnBM khususnya pada sektor otomotif mengungkap bahwa penerapan tarif PPnBM pada barang-barang mewah mampu menjadi alat untuk restrukturisasi konsumsi sekaligus memperkuat *principle of tax justice* (keadilan fiskal), di mana konsumen barang mewah memberikan kontribusi pendapatan negara yang lebih besar dibandingkan golongan konsumen barang kebutuhan pokok (Liwe et al, 2021).

Penerimaan dari PPN dan PPnBM menyediakan sumber dana yang relatif stabil dan dapat diprediksi untuk pembiayaan program pembangunan, belanja publik, dan penanggulangan defisit fiskal. Analisis atas determinan penerimaan pajak tersebut

menunjukkan hubungan positif antara konsumsi barang/jasa dengan penerimaan PPN dan PPnBM, sehingga kontribusi pajak ini terhadap APBN tidak hanya dalam jumlah absolut namun juga dalam mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang (Budiman, 2025).

2.1.5 Cukai

Cukai merupakan komponen penting dalam struktur penerimaan negara yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal tetapi juga memiliki implikasi terhadap dinamika ekonomi secara makro. *Cukai* dikenakan pada barang-barang tertentu seperti hasil tembakau, minuman beralkohol dan energi, untuk mengendalikan konsumsi barang yang dianggap memiliki dampak eksternalitas negatif sekaligus menjadi sumber pendapatan negara yang stabil (Nugroho et al., 2026). Secara teoritik, penerimaan dari cukai dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, sehingga memungkinkan pembiayaan belanja publik yang produktif untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan—faktor-faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Studi empiris yang menggunakan metode *Computed General Equilibrium (CGE)* menunjukkan bahwa penyesuaian tarif cukai pada minuman beralkohol di Indonesia pada tahun 2024 meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, meski pada saat yang sama moderat memengaruhi pertumbuhan industri tertentu dalam ekonomi (Tasya, 2024).

Selain itu, penelitian lintas negara juga menemukan bukti hubungan positif antara penerimaan cukai dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, kajian tentang efek cukai di beberapa negara Eropa menunjukkan bahwa pendapatan dari cukai

secara signifikan berkorelasi dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP), terutama ketika dikombinasikan dengan variabel lain seperti pembentukan modal dan keterbukaan perdagangan (Aydin & Esen, 2024). Meski penelitian tersebut tidak langsung menggunakan data Indonesia, temuan ini memberikan bukti empiris bahwa cukai tidak semata-mata sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga dapat berperan dalam mendukung kinerja ekonomi melalui penguatan basis fiskal dan peningkatan ruang belanja pemerintah (Riswandari & Monika, 2025).

Hubungan antara cukai dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu sederhana atau langsung. Penelitian oleh Solihah & Cahyono (2022) tentang kausalitas jangka pendek antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan cukai justru menunjukkan bahwa dalam beberapa periode historis, tidak terdapat bukti kausalitas langsung dari penerimaan cukai ke pertumbuhan ekonomi jangka pendek di Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi penerimaan cukai secara tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa efek cukai terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada kerangka waktu, struktur penerimaan fiskal lainnya, serta bagaimana pendapatan cukai digunakan oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yaitu yang dilakukan oleh Adefolake & Omodero (2022) membahas pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Fokus penelitian diarahkan pada pengaruh *Petroleum Profit Tax* (PPT), *Company Income Tax* (CIT), dan *Value Added Tax* (VAT) terhadap *Gross Domestic Product* (GDP). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan

pendekatan *ex-post facto* serta analisis *Vector Error Correction Model* (VECM) menggunakan data time series periode 2000–2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Petroleum Profit Tax* (PPT) dan *Value Added Tax* (VAT) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan *Company Income Tax* (CIT) berpengaruh negatif namun signifikan terhadap GDP. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak, khususnya pajak tidak langsung, memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Selanjutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2018) dalam penelitiannya menitikberatkan pada hubungan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang mencakup 34 provinsi selama periode 2013–2016. Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik regresi data panel dengan bantuan software Stata. Dari hasil analisis diperoleh bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan yang bersifat produktif.

Pendekatan yang berbeda digunakan oleh Putra dan Nabila (2022) dalam mengkaji peran pajak terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH21) terhadap konsumsi masyarakat, Gross Domestic Product (GDP), serta

pertumbuhan ekonomi. Metode yang diterapkan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data time series periode 2002–2021. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa PPN dan PPH memiliki pengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Namun, kedua variabel tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap GDP maupun pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan cenderung lebih berdampak pada sisi konsumsi dibandingkan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Penelitian pada hubungan antara pajak dan daya beli konsumen dengan tujuan utama untuk menganalisis pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) (Fatimah et al, 2025). Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur secara sistematis untuk memahami keterkaitan antara pajak dan perilaku konsumsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PPN dan PPnBM berpengaruh terhadap daya beli konsumen. PPN terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian barang mewah. Di sisi lain, PPnBM juga berpengaruh signifikan terhadap daya beli karena berkaitan dengan faktor status sosial dan prestise.

Hasil yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh penelitian Pratama dan Widyastuti (2022) yang membahas kaitan antara penerimaan pajak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Data yang digunakan berupa data time series selama 30 tahun. Berdasarkan hasil analisis, penerimaan

pajak tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengisyaratkan bahwa faktor stabilitas harga memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan penerimaan pajak dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain dilakukan oleh Pangka dan Budianto (2025) yang menyoroti keterkaitan antara kondisi makroekonomi dan penerimaan pajak di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pengaruh beberapa variabel makroekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam pelaksanaannya, penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder periode 2014–2023 yang kemudian dianalisis melalui regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) dan konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Sementara itu, inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kedua jenis pajak tersebut. Meskipun secara simultan seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbukti memberikan pengaruh yang signifikan dengan tingkat kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak.

Penelitian Akbari et al. (2022) mencoba melihat faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi rokok, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Variabel yang diteliti meliputi cukai rokok, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pendapatan, dan usia. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berdasarkan data primer yang diperoleh dari kuesioner

responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai rokok dan PPN tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok. Sebaliknya, pendapatan dan usia justru terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi individu dibandingkan oleh kebijakan pajak itu sendiri.

Kebijakan terkait cukai juga pernah dikaji dalam penelitian yang melihat dampaknya terhadap perekonomian secara lebih luas (Baidarus dan Siburian, 2018). Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan cukai pada kantong plastik menyebabkan kenaikan harga yang kemudian berdampak pada penurunan permintaan. Bahkan, setiap kenaikan harga sebesar 1% dapat menurunkan permintaan hingga 0,957%. Selain itu, penerapan tarif cukai sebesar 20% dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan cukai tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi.

Perubahan kebijakan anggaran juga menjadi salah satu topik yang banyak dibahas dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (Carita et al., 2025). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengombinasikan analisis kualitatif dan data kuantitatif sekunder selama periode 2019–2024. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana perubahan alokasi anggaran memengaruhi output dan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan *income dan spending*. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa perubahan anggaran, terutama pada masa pandemi Covid-19, memberikan dampak signifikan terhadap permintaan agregat dan kinerja ekonomi nasional. Peningkatan belanja pemerintah terbukti mampu mendorong proses pemulihan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam kajian lain, Budiantoro (2025) menyoroti bagaimana kebijakan pajak dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series periode 2020–2024 dengan pendekatan kuantitatif melalui teknik regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, nilai koefisien determinasi yang mencapai 83,1% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh kebijakan pajak. Hal ini menegaskan bahwa peran kebijakan fiskal, khususnya di bidang perpajakan, sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, optimalisasi kebijakan pajak menjadi salah satu strategi yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ekonomi.

Topik mengenai peran fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak luput dari perhatian para peneliti. Dalam hal ini, Muhammad, Safuridar, dan Yanirial (2025) menguji pengaruh retribusi daerah, pajak daerah, serta dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan data time series periode 2009–2023. Analisis dilakukan melalui regresi linier berganda untuk melihat hubungan antar variabel secara lebih mendalam. Hasil

yang diperoleh menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memang memiliki arah pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pengaruh tersebut tidak terbukti signifikan secara statistik. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa meskipun kontribusi fiskal daerah penting, masih terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kondisi perekonomian makro juga sering dikaitkan dengan naik turunnya penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini terlihat dalam penelitian Dewi dan Haryatiningsih (2021) yang menganalisis pengaruh beberapa indikator ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) selama periode 2007–2021. Dengan menggunakan metode kuantitatif melalui regresi linier berganda, penelitian ini mencoba melihat pengaruh masing-masing variabel secara lebih rinci. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sebaliknya, inflasi dan tingkat kemiskinan justru memberikan pengaruh yang signifikan. Namun jika dilihat secara bersama-sama, seluruh variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM.

Aspek eksternal, khususnya nilai tukar, turut menjadi variabel penting dalam menganalisis penerimaan pajak. Mispa (2021) meneliti pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun secara parsial, hanya nilai tukar rupiah yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Di sisi lain, PPnBM tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga menunjukkan bahwa faktor eksternal lebih dominan dalam memengaruhi penerimaan pajak.

Diastini et al (2024) dalam penelitiannya mengkaji peran ekspor dalam memoderasi pengaruh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data periode 2010–2022 dengan pendekatan kuantitatif melalui metode Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil analisis menunjukkan bahwa fasilitas KITE tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, nilai tukar terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Selain itu, ekspor tidak mampu memoderasi pengaruh fasilitas KITE terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, ekspor mampu memoderasi secara positif dan signifikan pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rincian temuan hasil penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Telaah hasil Penelitian Sebelumnya

| Nama Peneliti (ISSN) | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|--|---|---|---|
| Ayeni Olasubomi Adefolake & Cordelia Onyinyechi Omodero (2022) ISSN: 2331-1975 | <i>Tax Revenue and Economic Growth in Nigeria</i> | X: Petroleum Profit Tax (PPT), Company Income Tax (CIT), Value Added Tax (VAT) Y: | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petroleum Profit Tax (PPT) dan Value Added Tax (VAT) berpengaruh positif dan |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | Economic Growth (GDP) | signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria. Sementara itu, Company Income Tax (CIT) berpengaruh negatif namun tetap signifikan terhadap GDP, sehingga terdapat hubungan jangka panjang antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. |
| Hilda Hidayah dkk. (2025) e-ISSN: 3063-9530 | <i>The Effect of Income Tax on Economic Growth in Indonesia</i> | X: Pajak Penghasilan (PPH) Y: Pertumbuhan Ekonomi | PPH berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang, namun dalam jangka pendek tidak selalu signifikan karena dipengaruhi kondisi makroekonomi. |
| Anita Putri Giantoro (2023) ISSN: 2301-6280 (Print) ISSN: 2721-9879 (Online) | <i>The Impact of the Non-Oil and Gas Sector's Tax Revenue on Economic Growth in Indonesia</i> | X: PPN, PPh Badan, PPh Final, Bea dan Cukai, PBB Y: Pertumbuhan Ekonomi | Seluruh pajak non-migas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi periode 2013–2020. |
| Sekar Ayu C. Asri & Diky A. Suseno (2023) (ISSN jurnal tercantum pada JEBAV) | <i>The Effect of Value-Added Tax Policy on Per Capita Income and Inequality in Indonesia</i> | X: PPN, Investasi, Indeks Demokrasi Y: Pendapatan Per Kapita & Ketimpangan | PPN berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, namun tidak signifikan dalam jangka panjang dan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Karona C. Susena dkk. (2025) e-ISSN: 3064-5271</p> | <p><i>The Impact of Increasing PPN Rates on Economic Growth in Indonesia</i></p> | <p>X: PPN Pendapatan Nasional Y:</p> | <p>PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional berdasarkan analisis kualitatif.</p> |
| <p>Rika Febby Rhamadhani (2024) E-ISSN: 2988-1587</p> | <p><i>The Impact of Income Tax on Economic Growth: Insights from Indonesia</i></p> | <p>X: Pajak Penghasilan (PPh) Y: Pertumbuhan Ekonomi</p> | <p>Tarif PPh yang tinggi dapat menekan investasi, namun insentif pajak dan digitalisasi meningkatkan efektivitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi.</p> |
| <p>Ilham Febri Budiman (2025) e-ISSN: 2962-0813 p-ISSN: 2964-5328</p> | <p><i>Analisis Determinan Makroekonomi Inflasi dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia</i></p> | <p>X: Inflasi, Konsumsi Rumah Tangga Y: Penerimaan PPN & PPnBM</p> | <p>Inflasi dan konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM.</p> |
| <p>Rio Johan Putra & Shiva Dewanti Nabila (2026) E-ISSN: 2807-6311 P-ISSN: 2807-6494</p> | <p><i>The Effect of VAT and Payroll Tax (PPh21) on the Growth of Community Consumption, GDP, and Economic Growth in Indonesia</i></p> | <p>X: PPN, PPh 21 Y: Konsumsi, PDB, Pertumbuhan Ekonomi</p> | <p>PPN dan PPh 21 berpengaruh pada konsumsi masyarakat, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi periode 2002–2021.</p> |
| <p>Dini Vientiany dkk. (2024) e-ISSN: 3025-7859 p-ISSN: 3025-7972</p> | <p><i>Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Stabilitas Ekonomi Makro</i></p> | <p>X: PPN Y: Stabilitas Ekonomi Makro (PDB, Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar)</p> | <p>PPN memiliki hubungan positif dengan stabilitas ekonomi makro, terutama melalui keterkaitan dengan</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | pertumbuhan PDB dan indikator ekonomi lainnya. |
| Siti Fatimah dkk (2025) p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364 | <i>Influence of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods on Purchase Power Using a Systematic Literature Review (SLR) Approach</i> | X1: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) X2: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Y: Daya Beli Konsumen | Secara simultan PPN dan PPnBM berpengaruh terhadap daya beli konsumen. PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membeli barang mewah. PPnBM juga berpengaruh signifikan terhadap daya beli, dimana semakin tinggi pajak, menunjukkan peningkatan status sosial sehingga konsumen tetap bersedia membeli barang mewah. |
| Rio Johan Putra & Shiva Dewanti Nabila (2026) e-ISSN: 2685-936X, p-ISSN: 2685-9351 | <i>Pengaruh PPN (VAT) dan Payroll TAX (PPH21) terhadap Tingkat Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat, Gross Domestic Product, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia</i> | X1: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) X2: Pajak Penghasilan (PPH / Payroll Tax) Y1: Tingkat Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat Y2: Gross Domestic Product Y3: Tingkat Pertumbuhan Ekonomi | PPN dan PPH berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat, tetapi tidak berpengaruh terhadap GDP dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. |
| Isnaila Fentiana Alfitriyeni & Eka Vaulana Rhodhiska Wulandari | <i>Peran Ppn Dan Ppnbm Terhadap Penerimaan Negara Dan Stabilitas</i> | X1: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) X2: Pajak Penjualan atas Barang Mewah | Kenaikan PPN menurunkan konsumsi masyarakat, terutama kelompok |

| | | | |
|--|--|--|--|
| (2025) e-ISSN: 2827-7694 p-ISSN: – | <i>Ekonomi Nasional</i> | (PPnBM) Y1: Penerimaan Negara Y2: Stabilitas Ekonomi Nasional | menengah ke bawah, tetapi meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat posisi fiskal. Penekanan penting pada keseimbangan antara pendapatan negara dan perlindungan daya beli masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. |
| Arfah Habib Saragih (2018) p-ISSN: 2599-1876, e-ISSN: 2541-1691 | <i>Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia</i> | X: Penerimaan Pajak Y: Pertumbuhan Ekonomi | Penerimaan pajak provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi (2013–2016). Dukungan penerimaan pajak berkelanjutan diperlukan untuk mendanai proyek produktif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. |
| Muhammad Fikri Akbari dkk. (2022) e-ISSN: 2339-0840, p-ISSN: 2442-9368 | <i>Pengaruh Kenaikan Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pendapatan dan Usia terhadap Konsumsi Rokok Konvensional di Kalangan Usia</i> | X1: Cukai X2: Rokok X3: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) X4: Pendapatan Y: Usia Y: Konsumsi Rokok | Variabel Cukai Rokok dan PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap minat konsumsi rokok. Variabel Pendapatan dan Usia berpengaruh signifikan dan positif terhadap |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <i>20–30 Tahun di Jakarta Barat</i> | | minat konsumsi rokok di Jakarta Barat. |
| Bambang Budiantoro (2025) e-ISSN: 3021-7172 | <i>Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia</i> | X: Kebijakan Pajak Y: Pertumbuhan Ekonomi | Kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (2020–2024). Nilai R^2 0,831 menunjukkan 83,1% pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh kebijakan pajak, sisanya 16,9% oleh faktor lain. |
| Isnaila Fentiana Alfitriyeni & Eka Vaulana Rhodhiska Wulandari (2023) | <i>Peran PPN dan PPnBM terhadap Penerimaan Negara dan Stabilitas Ekonomi Nasional</i> | X1: PPN X2: PPnBM Y1: Penerimaan Negara Y2: Stabilitas Ekonomi | Kenaikan PPN menurunkan konsumsi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, tetapi meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat posisi fiskal. Penekanan penting pada keseimbangan antara pendapatan negara dan perlindungan daya beli masyarakat. |
| Muhammad Baidarus & Martin Tamaro Siburian (2018) p-ISSN: 2085-3785, e-ISSN: 2615-7780 | <i>Analisis Dampak Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Kantong Plastik terhadap</i> | X: Ekstensifikasi Cukai X2: Harga Kantong Plastik Y: Permintaan & | Pengenaan cukai pada kantong plastik menaikkan harga. Kenaikan 1% harga menurunkan permintaan |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <i>Perekonomian Indonesia</i> | Penerimaan Cukai | 0,957%. Tarif cukai 20% berpotensi meningkatkan penerimaan hingga Rp1,603 triliun. Kebijakan cukai efektif menurunkan konsumsi plastik. |
| Herlina Reva Carita dkk. (2025) e-ISSN: 2828-4585, p-ISSN: 2828-5514 | <i>Dampak Perubahan Anggaran terhadap Output dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam Sisi Income and Spending</i> | X1: Perubahan Anggaran X2: Pendapatan Negara X3: Belanja Pemerintah Y: Pertumbuhan Ekonomi & GDP | Perubahan anggaran signifikan memengaruhi permintaan agregat dan kinerja ekonomi, terutama saat pandemi Covid-19. Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran penting untuk stabilitas ekonomi. |
| Aprilia Diastini dkk. (2024) e-ISSN: 2798-396X, p-ISSN: 2776-9682 | <i>Peran Ekspor dalam Memoderasi Pengaruh Fasilitas KITE dan Kurs terhadap Pertumbuhan Ekonomi</i> | X1: Fasilitas KITE X2: Nilai Tukar Mata Uang Moderator: Kinerja Ekspor Y: Pertumbuhan Ekonomi | Fasilitas KITE tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar berpengaruh positif signifikan. Kinerja ekspor memoderasi pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi secara positif, namun tidak memoderasi fasilitas KITE. |
| Muhammad, Safuridar, Yanirial (2025) e-ISSN: 3025-7859, p-ISSN: 3025-7972 | <i>Pengaruh Restribusi Daerah, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap</i> | X1: Restribusi Daerah X2: Pajak Daerah X3: Dana Alokasi Umum Y: | Ketiga variabel berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan. |

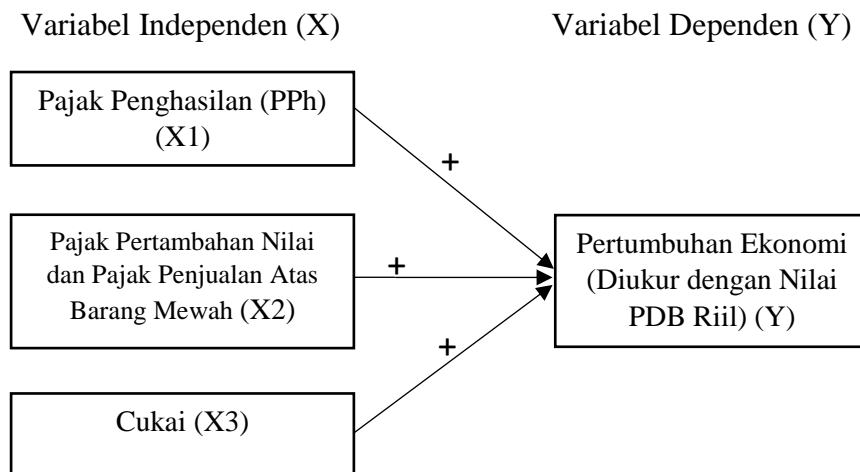
| | | | |
|--|--|---|--|
| | <i>Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia</i> | Pertumbuhan Ekonomi | |
| Afifah & Meti Astutimeti (2020) Vol.1 No.1 | <i>Analisis Pengaruh Trade Openness dan FDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN-5 (1998-2017)</i> | X1: Trade Openness (TO) X2: Foreign Direct Investment (FDI) Y: Pertumbuhan Ekonomi | TO negatif dan tidak signifikan, FDI positif signifikan. Secara simultan TO dan FDI tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN-5. |
| Nenti Arianti Dewi & Ria Haryatiningsih (2021) Vol.2 Issue 1 | <i>Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia 2007-2021</i> | X1: PDB X2: Inflasi X3: Persentase Penduduk Miskin Y: Penerimaan PPN & PPnBM | PDB tidak signifikan, inflasi dan persentase miskin signifikan. Semua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. |
| Sitti Mispa (2021) Vol.2 Issue 1 | <i>Pengaruh PPnBM dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Barat</i> | X1: PPnBM X2: Nilai Tukar Rupiah Y: Penerimaan Pajak | Secara simultan PPnBM dan nilai tukar berpengaruh signifikan. Parsial: PPnBM tidak signifikan, nilai tukar signifikan positif terhadap penerimaan pajak. |
| Refilio Andika Pratama & Shinta Widyastuti (2022) | <i>Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia</i> | X1: Penerimaan Pajak X2: Tingkat Inflasi Y: Pertumbuhan Ekonomi | Penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. |
| Sirilus Alfredo Pangka & Risanda | <i>Analisis Variabel Makroekonomi</i> | X1: PDB X2: Inflasi X3: Konsumsi | PDB dan konsumsi rumah tangga |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Alirastra Budianto (2025) e-ISSN: 2597-4599 | <i>terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia: Studi pada PDB, Inflasi, dan Konsumsi Rumah Tangga</i> | Rumah Tangga Y: Penerimaan PPN & PPnBM | berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Inflasi tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan dengan kontribusi model sebesar 95,6%. |
|---|---|--|--|

Walaupun berbagai penelitian terdahulu telah memberikan dasar yang cukup kuat dalam menjelaskan hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi, masih terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi alasan penting dilakukannya penelitian lanjutan. Pertama, studi Hilda Hidayah dkk. (2025) menemukan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) memiliki pengaruh positif dalam jangka panjang, namun tidak selalu signifikan dalam jangka pendek karena dipengaruhi oleh dinamika kondisi makroekonomi, sehingga hasilnya belum sepenuhnya konsisten. Kedua, penelitian Anita Putri Giantoro (2023) menunjukkan bahwa pajak sektor non-migas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi analisis yang dilakukan masih bersifat umum dan belum menguraikan secara rinci peran masing-masing jenis pajak, seperti PPh, PPN/PPnBM, dan cukai. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan mengkaji secara lebih spesifik dan komprehensif pengaruh ketiga jenis pajak tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode yang lebih panjang, yaitu 1985–2024.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan fokus pada pengaruh Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan PPnBM, serta cukai terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia guna mengatasi keterbatasan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan menganalisis ketiga jenis pajak tersebut secara simultan dan lebih terperinci, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi masing-masing instrumen fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penggunaan periode penelitian yang lebih panjang, yaitu 1985–2024, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh, serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.3 Kerangka Konseptual



Sumber: Data olahan peneliti, 2026

Gambar 2. 1 Kerangka Bepikir

Gambar 2.1 tersebut mencerminkan model konseptual yang menunjukkan hubungan antara tiga variabel utama, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan PPnBM, serta Cukai terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berikut adalah penjelasan logika hubungan antar variabel berdasarkan representasi tersebut:

1. Pengaruh Langsung Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Garis panah yang mengarah dari variabel PPh ke Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan adanya pengaruh langsung.
2. Pengaruh Langsung PPN dan PPnBM terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Garis panah dari PPN dan PPnBM ke Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan hubungan langsung melalui aktivitas konsumsi
3. Pengaruh Langsung Cukai terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Garis panah dari Cukai ke Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa cukai juga memiliki pengaruh langsung. Meskipun cukai berfungsi sebagai instrumen

pengendalian konsumsi terhadap barang tertentu, penerimaan dari pajak tersebut tetap menjadi bagian dari sumber pendanaan negara.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi karena berkaitan langsung dengan tingkat pendapatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika penerimaan PPh meningkat, hal ini menunjukkan bahwa individu maupun badan usaha memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga mencerminkan kondisi ekonomi yang berkembang. Peningkatan pendapatan tersebut akan mendorong konsumsi dan investasi, yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi (Riyadi et al, 2021). Selain itu, penerimaan PPh yang tinggi juga memperbesar kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan program-program produktif. Dengan demikian, semakin optimal penerimaan PPh, semakin besar pula potensi peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Apabila dianalisis dalam teori pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh aktivitas produksi, distribusi pendapatan, serta akumulasi modal dalam suatu perekonomian sebagaimana dijelaskan oleh David Ricardo. Ketika kegiatan ekonomi berkembang dan pendapatan masyarakat meningkat, kemampuan individu maupun badan usaha dalam menghasilkan

surplus ekonomi juga bertambah, yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Peningkatan penerimaan PPh menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berjalan lebih produktif dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui teori Keynes yang menyatakan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan akan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan dan mendorong permintaan agregat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan distorsi apabila tarif terlalu tinggi. Dalam perspektif teori pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan output melalui peran pemerintah dalam perekonomian. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, investasi, dan belanja pemerintah yang produktif. PPh sebagai sumber utama penerimaan negara memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kapasitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Sihalaho (2020) yang menemukan bahwa PPh berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, serta didukung oleh penelitian Rhamadhani (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan PPh yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi kebijakan fiskal.

Argumen mengenai pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh berbagai temuan penelitian terdahulu yang searah. Sihalaho (2020) menemukan bahwa PPh berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, yang menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan. Selain itu, penelitian Huda et al (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Penghasilan yang efektif mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi kebijakan fiskal dan peningkatan aktivitas ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa PPh memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan negara. Berdasarkan argument dan bukti empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pajak Penghasilan (PPh) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

2.4.2 Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM (PPNPPnBM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa oleh masyarakat. PPN dikenakan pada hampir seluruh transaksi konsumsi, sedangkan PPnBM lebih spesifik pada barang-barang yang tergolong mewah sebagai instrumen pengendalian konsumsi dan pemerataan. Dalam konteks makroekonomi, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga setiap perubahan dalam pola

konsumsi akan berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penerimaan dari PPN dan PPnBM memiliki keterkaitan erat dengan dinamika aktivitas ekonomi suatu negara (Mawarni et al, 2021).

Dinamika pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh proses produksi dan aktivitas perdagangan dan konsumsi yang terjadi di dalam perekonomian. Pemikiran David Ricardo menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan bagaimana kegiatan ekonomi menghasilkan nilai tambah melalui proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Semakin aktif kegiatan transaksi dalam pasar, semakin besar pula nilai tambah yang tercipta dalam perekonomian. Aktivitas tersebut kemudian tercermin dalam penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dalam rantai produksi dan konsumsi. Ketika konsumsi masyarakat meningkat dan perdagangan barang maupun jasa menjadi lebih intensif, penerimaan dari PPN dan PPnBM cenderung ikut meningkat karena kedua pajak ini berkaitan langsung dengan aktivitas transaksi ekonomi. Dalam perspektif teori peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM mencerminkan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat yang dapat memperkuat permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, hubungan antara PPNPPnBM dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat langsung dan linear. Dalam jangka pendek, kenaikan tarif PPN dapat memicu peningkatan harga barang dan jasa yang berdampak pada inflasi serta penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini berpotensi menekan konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Akan

tetapi, dalam jangka panjang, apabila penerimaan pajak tersebut dialokasikan secara efisien dan produktif, maka efek negatif jangka pendek dapat diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi dan investasi, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ompusungu et al, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu mendukung adanya hubungan positif antara PPN dan pertumbuhan ekonomi. Liyana (2021) menemukan bahwa penerimaan PPN berpengaruh positif signifikan terhadap PDB di Indonesia karena kontribusinya terhadap pendapatan negara. Penelitian oleh Bahtiar et al (2025) menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak konsumsi mampu memperkuat struktur fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah. Sehingga negara yang mengandalkan PPN sebagai sumber utama penerimaan cenderung memiliki stabilitas fiskal yang lebih baik, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, berdasarkan teori fiskal dan temuan empiris sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNPPnBM) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

2.4.3 Pengaruh Cukai terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti konsumsi yang perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta menimbulkan dampak eksternalitas negatif bagi masyarakat. Barang kena cukai umumnya meliputi

produk seperti rokok, minuman beralkohol, dan produk tertentu lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak sosial maupun kesehatan. Selain berfungsi sebagai instrumen regulatif untuk mengendalikan konsumsi, cukai juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberadaan cukai memiliki peran ganda, yaitu sebagai alat pengendali sekaligus sebagai sumber pendanaan pembangunan (Sondayani, 2024).

Melalui Teori Keynes, penerimaan cukai dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi karena menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Semakin optimal penerimaan cukai yang diperoleh pemerintah, semakin besar pula kemampuan negara dalam menyediakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan pembangunan lainnya yang dapat mendorong aktivitas ekonomi. Selain itu, fungsi cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi barang tertentu juga membantu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang baik.

Pengaruh cukai terhadap pertumbuhan ekonomi juga memiliki dinamika yang kompleks. Dalam jangka pendek, peningkatan tarif cukai dapat menurunkan konsumsi barang kena cukai, yang pada satu sisi dapat mengurangi aktivitas ekonomi di sektor terkait. Akan tetapi, dari sudut pandang kesejahteraan, penurunan konsumsi barang yang berdampak negatif justru dapat memberikan manfaat sosial dalam jangka panjang, seperti peningkatan kualitas

kesehatan masyarakat dan penurunan biaya eksternalitas. Selain itu dalam Marbun (2025) apabila penerimaan cukai dialokasikan secara efektif untuk kegiatan produktif, maka dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih dominan dibandingkan efek kontraktif jangka pendek

Penelitian oleh Riswandari & Monika (2025) menemukan bahwa penerimaan cukai rokok memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Sementara itu, studi oleh Suparlan & Alwi (2025) menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan cukai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja pemerintah. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Cukai berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.